

Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance in Bank Soundness (Empirical Study at PT. BPR Intan Jabar)

Rahmat¹⁾

¹⁾*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas, rahmat@ekuitas.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempresentasikan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan pengaruhnya terhadap kinerja yang diukur dengan suara bank di Bank Perkreditan Masyarakat. Subjek penelitian adalah PT. BPR Intan Jabar Kabupaten Garut. Alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Good Corporate Governance dan pengaruhnya terhadap kesehatan Bank yang dilaksanakan di BPR. Objek penelitian tersebut terkait dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Keadilan. Sedangkan indikator penilaian kesehatan bank meliputi Permodalan, kesehatan bank meliputi Permodalan, Aset Poduktif, Manajemen, Penghasilan, dan Likuiditas. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif menggunakan data sekunder selama 5 (lima) tahun terakhir dari 2015 hingga 2019. dan Maret 2020 Berdasarkan hasil diskusi di PT. BPR Intan Jabar menunjukkan bahwa penerapan GCG sangat baik dan suara bank dianggap sehat. Hasil tes statistik menunjukkan bahwa implementasi GCG yang baik mempengaruhi kesehatan bank.

Kata kunci: GCG, BPR, CAMEL.

ABSTRACT

This study aims to present the Implementation of Good Corporate Governance and its influence on performance as measured by the soundness of banks at Rural Credit Banks. The subject of the research is PT. BPR Intan Jabar Garut Regency. The reason for this research is to find out the extent of the implementation of Good Corporate Governance and its influence on the health of the Bank implemented at the BPR. The object of the research is related to the application of GCG principles which include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. While the indicators of bank health assessment include Capital, Poductive Assets, Management, Earning, and Liquidity. The research method uses descriptive analysis using secondary data during the last 5 (five) years from 2015 to 2019. and March 2020 Based on the results of discussions at PT.BPR Intan Jabar shows that the application of GCG is very good and the soundness of the bank is considered healthy. The statistical test results show that good GCG implementation affects bank health.

Keywords: GCG, BPR, CAMEL.

PENDAHULUAN

Sebagaimana dilaporkan dalam Booklet Perbankan Indonesia Regulator Jasa Keuangan (2017), pesatnya pertumbuhan sektor jasa keuangan berdampak pada perubahan peta persaingan antar lembaga keuangan di Indonesia, khususnya di industri keuangan mikro. Dalam menyediakan produk dan layanan sesuai kebutuhan konsumen di lingkungan yang sangat kompetitif, pelaku pasar perlu lebih kreatif. Sebagai salah satu pelaku pasar keuangan mikro, dengan berpegang pada praktik pengelolaan bank yang sehat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) harus siap menghadapi persaingan tersebut. Upaya ini perlu terus dilakukan guna memenuhi visi pengembangan BPR yaitu sektor BPR yang secara efektif mewakili Usaha Mikro Kecil dan Kecil (UMK) dan penduduk lokal serta mengarah pada pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, dalam upaya mencapai visi pertumbuhan BPR, salah satu kebijakan umum pembentukan BPR, termasuk strategi pengelolaan BPR, ditujukan untuk memperkuat metode pengelolaan yang berbasis pada tata kelola perusahaan yang baik. Disajikan. Penyesuaian praktik

pengawasan juga akan diikuti dengan perubahan paradigma peraturan perundang-undangan BPR.

Keberhasilan BPR, baik internal maupun eksternal, dikompromikan oleh banyak faktor. Daya tarik utamanya adalah fungsi BPR yang relatif mudah bagi bank konvensional dan bank syariah dalam memberikan kredit dan memiliki manfaat simpanan, sehingga BPR masih diminati. Reagen utama dikenal sebagai segmentasi konsumen BPR yang memasarkan produk mereka ke kelompok kecil dan juga UMK.

Terlihat dari ketersediaan lembaga perkreditan di hampir semua kecamatan di Indonesia, BPR merupakan salah satu jenis lembaga keuangan mikro Indonesia yang tertanam dalam kondisi sosial ekonomi pedesaan Indonesia. Peran BPR sebagai badan perantara yang dapat dengan mudah diakses oleh usaha masyarakat di pedesaan diproyeksikan dapat memperluas dan meningkatkan daya saing UMK.

Bank Indonesia mengusulkan pada tahun 2006 bahwa peran BPR dalam penyediaan layanan kepada UMK harus ditingkatkan dengan meningkatkan kelembagaan BPR dengan meningkatkan berbagai faktor, termasuk sistem keuangan, sumber daya manusia, permintaan konsumen, dukungan infrastruktur dan operasional BPR yang efisien. Karena persaingan yang semakin ketat, BPR justru harus bersaing dengan unit pembiayaan lain, seperti bank umum.

Sejauh ini, BPR telah memainkan peran yang cukup berhasil dalam keberhasilan proses intermediasi perbankan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah dana yang dapat dihimpun dan disalurkan, serta peningkatan jumlah konsumen yang dilayani oleh BPR dan peningkatan pencapaian UMK yang menjadi nasabah BPR. Posisi ini juga terlihat. Kepada BPR. Tantangannya tidak bisa dibedakan dari itu. Untuk menegakkan GCG, ada beberapa hal sederhana yang melibatkan

BPR. Pertama, sudah ada BPR yang izin pasarnya dibekukan, bukan karena kalah bersaing dengan lembaga keuangan lain, melainkan karena tata kelola yang baik / GCG belum ditegakkan oleh manajemen BPR. Kedua, masih adanya penatausahaan dan pengelolaan dana dan keuangan BPR yang belum dilakukan dengan baik dan sebagian besar untuk kepentingan pribadi. Selain itu, manajemen risiko di BPR masih kurang baik bahkan ada yang belum memahami risiko, sehingga karena tidak memahami manajemen risiko, efisiensi BPR menurun. Pengabdian BPR untuk melaksanakan GCG secara konsisten akan dapat menjauhkan BPR dari berbagai masalah berisiko tinggi. BPR memiliki kemampuan untuk menjadi tidak sehat tanpa bantuan kegiatan GCG. Ini bisa berbahaya dan merusak profitabilitas perusahaan BPR itu sendiri. Kondisi kronis yang berbeda dapat melemahkan BPR jika basis BPR dilemahkan. Akibatnya, BPR akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya.

Sejalan dengan pertumbuhan volume usaha dan peningkatan risiko, maka diperlukan penerapan tata kelola yang baik di bidang perbankan khususnya BPR. Penggabungan tata kelola juga dimaksudkan untuk melindungi para pemangku kepentingan. Meningkatkan efisiensi bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan tata kelola juga membutuhkan prinsip-prinsip etika yang disepakati secara luas di dunia perbankan, sehingga diharapkan masyarakat semakin dipercaya oleh industri perbankan khususnya BPR. Memang sangat besar, berdasarkan kemampuan BPR untuk menumbuhkan usaha mikro dan kecil, namun masih terdapat tantangan yang dihadapi sehingga diperlukan regulasi tata kelola BPR. Penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang penerapan Good Corporate Governance di PT, berdasarkan konteks diatas. BPR Intan Jawa Barat, Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank

dengan menggunakan proses CAMEL, dan pengaruh hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Tingkat Kesehatan di PT.BPR Intan Jawa Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Tata kelola perusahaan adalah salah satu komponen utama dari pengembangan kinerja ekonomi, dan memerlukan berbagai kemitraan dengan manajer bisnis, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan adalah salah satu alat yang digunakan untuk melacak masalah kontrak dan membatasi tindakan oportunistik dalam manajemen.

Definisi diberikan oleh berbagai pakar dan organisasi. Diklarifikasi, menurut Shleifer dan Vishny (1997), bahwa "tata kelola perusahaan merupakan bagian dari metode atau mekanisme untuk meyakinkan pemilik modal agar memperoleh pengembalian yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan".

Prowse (1998) mencatat bahwa 'tata kelola perusahaan adalah instrumen untuk memastikan bahwa direktur atau eksekutif berperilaku untuk kepentingan pemilik luar (kreditor dan investor institusional) untuk kepentingan terbaik mereka.'

Azhar Maksum (2005:2) menggambarkan tata kelola perusahaan sebagai "sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta hubungan yang baik, adil dan transparan antara berbagai pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan (stakeholders) di dalam perusahaan"

Tangkilisan (2003), GCG adalah kerangka kerja dan proses manajemen perusahaan dengan tujuan meningkatkan ekuitas pemegang saham dan mengalokasikan berbagai pemangku kepentingan seperti kreditor, vendor, kelompok industri, klien, staf, pemerintah dan masyarakat luas untuk memisahkan

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117 / M-Mbu / 2002 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aspek lainnya, penerapan Good Corporate Governance pada BUMN berupaya untuk mengoptimalkan kemanfaatan BUMN dengan meningkatkan nilai-nilai transparansi, kejujuran, kepercayaan, akuntabilitas dan keadilan sehingga bisnis, baik nasional maupun internasional memiliki daya saing yang tinggi;

Manfaat penerapan GCG (Daniri, 2005: 16) adalah mengurangi biaya keagenan, menurunkan biaya modal, meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dalam jangka panjang; dan mengevaluasi dukungan para pemangku kepentingan di lingkungan tersebut untuk kehidupan perusahaan dan berbagai taktik dan kebijakan yang diterapkan

Keunggulan menurut FCGI (2008) penerapan tata kelola perusahaan yang baik:

- a) Meningkatkan keberhasilan perusahaan dengan mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih kuat, meningkatkan kualitas operasi organisasi dan lebih meningkatkan layanan pemangku kepentingan.
- b) Memudahkan dalam mengakses dana pembiayaan yang tidak mahal sehingga nilai bisnis dapat lebih meningkat.
- c) Memulihkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
- d) Pemegang saham akan senang dengan keberhasilan bisnis dan ekuitas dan dividen juga akan meningkat.

GCG dapat disimpulkan menjadi, pertama, suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Kedua, suatu sistem

pengecekan dan pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan. Ketiga, suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya. Berdasarkan beberapa pendapat dan pandangan para ahli maka dapat disimpulkan *Good Corporate Governannce* BPR adalah tata kelola BPR yang terintegrasi dengan melibatkan pengurus dan pegawai bank dalam mengendalikan banknya dalam upaya memberikan nilai kepada pemilik, pengurus, pegawai, dan nasabah yang lebih baik.

Penting untuk menerjemahkan konsep-konsep di atas ke dalam lima dimensi, yang didefinisikan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Growth) sebagai pedoman untuk pengembangan sistem hukum, struktural dan regulasi tata kelola perusahaan di suatu wilayah, memiliki lima aspek:

- a) Hak istimewa pemegang saham dan peran kepemilikan: penting untuk mempertahankan dan mempromosikan hak pemegang saham.
- b) Distribusi yang setara dari semua pemegang saham: Semua pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, harus diperlakukan sama. Insentif yang adil untuk perhatian harus diberikan kepada semua pemilik jika kepentingan mereka dilanggar.
- c) Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan: hak pemangku kepentingan harus dihormati sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan harus dibentuk dalam upaya bersama untuk menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan kelangsungan pasar.
- d) Pengungkapan dan transparansi: pengungkapan atau pengungkapan yang

tepat waktu dan akurat, termasuk status keuangan, detail, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan, dari semua aspek material bisnis.

- e) Tanggung jawab direksi: Pengawasan administrasi perusahaan oleh Direksi harus efektif, diikuti dengan persyaratan manajemen strategis, serta tanggung jawab dan kewajiban Dewan. Direktur dan Komisaris dengan organisasi dan pemilik.

Setiap organisasi harus memastikan, menurut KNKG (2006: 5-7), standar GCG diperluas ke setiap bagian bisnis dan di semua tingkatan perusahaan. Untuk mencapai kelangsungan usaha dengan memperhatikan para pemangku kepentingan, diperlukan nilai-nilai GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tugas, kebebasan, serta keadilan dan kesetaraan.

Good Corporate Governance BPR

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685), selanjutnya disebut POJK perlu untuk mengatur pelaksanaan Tata Kelola BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Tata kelola adalah tata kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Openness (transparansi) pada tahap pengambilan keputusan adalah keterbukaan dalam menyampaikan konten dan pengetahuan serta keterbukaan terkait.
- b) Akuntabilitas, termasuk konsistensi peran dan penyelenggaraan pertanggungjawaban badan usaha BPR dalam rangka menjaga efisiensi pengelolaan.

- c) Responsibility yaitu penegakan pengelolaan BPR dengan regulasi regulasi dan konsep pengelolaan BPR yang sehat.
- d) Independensi, yaitu tanpa campur tangan atau paksaan dari kelompok mana pun, pengurus BPR yang kompeten.
- e) Dalam pemenuhan hak stakeholders yang muncul berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan, pemerataan, masing-masing adalah keadilan dan persamaan.

Penerapan GCG di BPR dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan promosi perekonomian nasional dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), sebagaimana dituangkan dalam Peraturan No 20 / POJK.03 / Tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan tentang BPR, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendorong penciptaan pasar yang dinamis.

Dasar Hukum Berfokus pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR No 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR No 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Surat Edaran BPR dan Otoritas Jasa Keuangan No 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG di semua jenjang.

Tingkat Kesehatan Bank

Budisantoso dan Triandaru (2005:51) mengartikan kesehatan bank sebagai “kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Budisantoso dan Triandaru (2006:51), kegiatan itu meliputi:

1. Kemampuan menarik uang komunitas, organisasi lain, dan modal sendiri:
2. Kemampuan penangan dana:
3. Mampu menyalurkan dana publik:
4. Kapasitas untuk memenuhi tugas kepada pemerintah, karyawan, pemilik modal dan pihak lain:

5. Merumuskan aturan perbankan saat ini. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib menjamin tingkat kesehatan yang sesuai dengan persyaratan terkait dengan kecukupan sumber daya, tingkat aset, dan kualitas pengelolaan. Likuiditas, keberlanjutan dan solvabilitas, serta masalah perbankan lainnya, dan mereka harus menjalankan bisnis sesuai dengan hukum bisnis bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 6/23 / DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank adalah penilaian secara kualitatif, melalui pemeriksaan kekayaan, kualitas aset, pengelolaan, dan berbagai faktor yang terkait dengan status atau efisiensi bank. Dimensi profitabilitas, likuiditas, dan sensitivitas. Resiko Perusahaan Memerangi. Pengukuran variabel-variabel tersebut dilakukan melalui penelitian kuantitatif dan kualitatif, yang setelah mempertimbangkan unsur-unsurnya, menitikberatkan pada materialitas dan signifikansi faktor-faktor evaluasi serta pengaruh dari faktor-faktor lain, seperti kondisi sektor perbankan dan ekonomi nasional. Dari putusan tersebut. Berdasarkan Keputusan Bank Indonesia No 30/12 / KEP / DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara

Penetapan Tingkat Kesehatan BPR, tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan berbagai metrik. Laporan keuangan bank yang bersangkutan merupakan salah satu metrik pertama yang digunakan sebagai dasar penilaian. Lima aspek evaluasi biasanya digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan perbankan, yaitu (1) uang, (2) kas, (3) manajemen, (4) keuntungan, dan (5) likuiditas, yang biasa disebut CAMEL.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian dengan cara menguraikan dan memperhatikan hasil data yang diperoleh untuk dijabarkan berdasarkan keterangan yang didukung teori namun dalam penelitian ini tidak melakukan hipotesis dengan menitikberatkan pada hal-hal yang berhubungan dengan *good corporate governance*.

Teknik Analisis

Teknik analisis penelitian ini dengan mengumpulkan informasi dari kepustakaan yang berhubungan dengan *corporate governance* pada perbankan. Sumber kepustakaan diperoleh dari Buku dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta sumber lainnya yang sesuai.

Pembatasan Masalah Penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar masalah dapat dijawab dan dikaji secara mendalam serta dapat terfokus pada masalah yang akan diteliti maka dari berbagai masalah yang ada perlu dibatasi.

Pembatasan masalah dibatasi pada Penerapan GCG dan CAMEL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan proses bisnis suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat memastikan bahwa proses sektor dan pengelolaan aset operasional dilakukan dengan cara yang aman, hati-hati, patuh, efektif, menguntungkan dan patuh, sesuai dengan prinsip etika terkait, dengan menjaga nilai-nilai inti GCG, termasuk transparansi dan akuntabilitas. Kewajiban, profesionalisme dan keadilan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4 / POJK.03 / 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5 / SEOJK.03 / 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat yang Mewajibkan Badan Perbankan Untuk Mengadopsi dan Menyampaikan Laporan GCG ke Bidang Keuangan Otoritas Jasa diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan BPR. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 04 / POJK.03 / 2015 terkait dengan penerapan tata kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 05 / SEOJK.03 / 2016 terkait dengan penerapan tata kelola bagi BPR, Dalam rangka meningkatkan kesinambungan penerapan GCG di perdesaan, diharapkan dapat diterapkan di semua tingkatan dan di semua tingkatan.

Tabel 1
Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan GCG BPR

No	Aspek Yang dinilai	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai $C=((a) \times (b))$
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1 s.d. 5	20	1,00 s.d. 5,00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris	1 s.d. 5	15	1,00 s.d. 5,00
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1 s.d. 5	0	1,00 s.d. 5,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1 s.d. 5	10	1,00 s.d. 5,00
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	1 s.d. 5	10	1,00 s.d. 5,00
6	Penerapan fungsi audit intern	1 s.d. 5	10	1,00 s.d. 5,00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	1 s.d. 5	0	1,00 s.d. 5,00
8	Penerapan manajemen risiko	1 s.d. 5	10	1,00 s.d. 5,00
9	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1 s.d. 5	7.5	1,00 s.d. 5,00
10	Rencana bisnis BPR	1 s.d. 5	7.5	1,00 s.d. 5,00
11	Transparansi kondisi keuangan dan pelaporan	1 s.d. 5	10	1,00 s.d. 5,00
Total			100	1,00 s.d. 5,00

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 2
Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan GCG BPR

Nilai Komposit	Predikat Komposit
$1.0 \leq \text{Nilai komposit} < 1.8$	Sangat Baik, sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
$1.8 \leq \text{Nilai komposit} < 2.6$	Baik, sesuai dengan Kriteria/Indikator.
$2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$	Cukup Baik, cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
$3.4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.2$	Kurang Baik, Kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
$4.2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5.0$	Tidak Baik. Tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Sumber: Bank Indonesia dan SE OJK Nomor 8/SEOJK.03/2016

Berdasarkan uraian diatas dapat dihitung penilaian penerapan *Good Corporate Governance* PT.BPR Intan Jabar sebagaimana tertera pada Tabel 3 sampai Tabel 4. Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan GCG PT.BPR Intan Jabar,

dengan catatan aspek ketiga yaitu Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite tidak diperhitungkan (bobot 0%), karena sesuai ketentuan untuk BPR yang modal intinya kurang dari 50 miliar tidak diwajibkan.

Tabel 3
Rekap Perhitungan Nilai Peringkat Pelaksanaan GCG PT.BPR Intan Jabar
Tahun 2015 s.d 2020

No	Aspek yang dinilai	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata2
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	3	4	1	1	1	1	1,83
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	3	4	1	1	1	1	1,83
3	Penanganan Benturan Kepentingan	3	3	3	1	1	1	2,00
4	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	5	4	3	2	1	1	2,67
5	Penerapan fungsi audit intern	3	2	3	1	1	1	1,83
6	Penerapan fungsi audit ekstern	2	3	3	1	1	1	1,83
7	Penerapan manajemen risiko	5	3	4	2	1	1	2,67
8	Batas Maksimum Penyaluran Dana	2	2	2	1	1	1	1,50
9	Rencana bisnis BPR	2	2	2	1	2	2	1,83
10	Transparansi kondisi keuangan serta pelaporan internal	3	2	3	1	1	1	1,83
TOTAL		3,10	2,90	2,50	1,20	1,10	1,10	1,98

Tabel 4
Rekap Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan GCG PT.BPR Intan Jabar
Tahun 2015 s.d 2020

No	Aspek yang dinilai	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata2
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,60	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,37
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,45	0,60	0,15	0,15	0,15	0,15	0,28
3	Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,30	0,30	0,10	0,10	0,10	0,20
4	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,10	0,27
5	Penerapan fungsi audit intern	0,30	0,20	0,30	0,10	0,10	0,10	0,18
6	Penerapan fungsi audit ekstern	0,05	0,08	0,08	0,30	0,03	0,03	0,05
7	Penerapan manajemen risiko	0,50	0,30	0,40	0,20	0,10	0,10	0,27
8	Batas Maksimum Penyaluran Dana	0,15	0,15	0,15	0,08	0,08	0,08	0,11
9	Rencana bisnis BPR	0,15	0,15	0,15	0,08	0,15	0,15	0,14
10	Transparansi kondisi keuangan serta pelaporan internal	0,23	0,15	0,23	0,08	0,08	0,08	0,14
		0,23	3,13	2,25	1,20	1,08	1,08	1,99

Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan *Self assessment* di PT.BPR

Intan Jabar untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

Penilaian Komposit GCG pada PT.BPR Intan Jabar dalam kurun waktu 6(enam) tahun terakhir yaitu dari Tahun 2015 sampai Maret 2020 dengan nilai rata rata 1,98 berada di peringkat 2 atau baik, dengan perincian tiap indikator sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Estimasi posisi Direksi telah dilakukan secara efektif dan rapat Direksi dilakukan secara efektif dan teratur. Cita-cita GCG telah terpenuhi dengan pelaksanaan peran dan kewajiban Direksi.

Peringkat rata-rata untuk aspek ini selama 6 tahun terakhir adalah 2 (Baik).

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Menilai pelaksanaan peran dan kewajiban Dewan Komisaris BPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator Jasa Keuangan dalam rangka penerapan GCG. Ini menyangkut jumlah dan ukuran Dewan Komisi, standar dan independensi, efektivitas rapat dan pertanggungjawabannya.

Peringkat rata-rata selama 6 tahun terakhir untuk faktor ini adalah 2 (Baik).

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator Jasa Keuangan untuk penerapan GCG, telah dilakukan review terhadap kecukupan struktur, pengalaman, integritas dan kompetensi Komite, serta pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite. Komite secara umum. Uh, selesai. Membentuk komite penilai, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan seleksi adalah hal terbaik untuk dilakukan. Terdapat prosedur dan peraturan yang digunakan oleh komite untuk menjalankan tugas masing-masing komite. Untuk BPR Intan Jabar belum diwajibkan, karena

modal inti yang ada masih dibawah 50 Miliar.

Indikator ini tidak diperhitungkan untuk BPR yang modal intinya kurang dari 50 Miliar.

4. Penanganan benturan kepentingan

Tidak ada / tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang menilai perlakuan benturan kepentingan yang diatur dalam prosedur tersendiri.

Peringkat rata-rata selama 6 tahun terakhir untuk faktor ini adalah 2 (Baik).

5. Penerapan fungsi kepatuhan

Menilai apakah Peran Kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan bekerja secara memadai sesuai dengan peran dan yurisdiksinya serta cukup mempertahankan independensinya. Apakah BPR memiliki instruksi pekerjaan, proses dan praktek kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peringkat rata-rata selama 6 tahun terakhir untuk faktor ini adalah 3 (Cukup Baik).

6. Penerapan fungsi audit intern

Menilai pelaksanaan fungsi audit intern BPR jika dilakukan secara terpisah dan obyektif dengan mengacu pada spesifikasi pelaksanaan audit intern yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Peringkat rata-rata selama 6 tahun terakhir untuk faktor ini adalah 2 (Baik).

7. Penerapan fungsi audit ekstern

Mengevaluasi kinerja audit Akuntan Publik, jika persyaratan kinerja audit telah dipenuhi dan konsistensi laporan audit Akuntan Publik sesuai dengan aturan akuntansi Pemilihan Akuntan Publik dan KAP dilakukan sesuai dengan dengan regulasi yang relevan.

Peringkat rata-rata selama 6 tahun terakhir untuk faktor ini adalah 2 (Baik).

8. Penerapan Manajemen Risiko

Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian risiko dengan masing-masing BPR, jika telah dijalankan dengan sangat efisien. Penilaian risiko dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan pilar-pilar pengawasan, termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Eksekutif, komunikasi dan rapat berkala. Juga menilai kecukupan kebijakan dan prosedur serta menetapkan batasan, menetapkan, melacak, mengatur dan mengelola ancaman, serta memperkuat pelaksanaan manajemen risiko yang sejalan dengan perkembangan bisnis Bank.

Peringkat rata-rata selama 6 tahun terakhir untuk faktor ini adalah 3 (Cukup Baik).

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Evaluasi apakah LLL rusak / terlampaui. Di atas batas minimal yang ditetapkan sebesar 8 persen adalah rasio kecukupan modal (CAR). Penyaluran dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana yang cukup besar (eksposur besar) dilakukan melalui penelaahan atas perhatian manajemen risiko dan persyaratan kehati-hatian. Keputusan mengenai alokasi dana, khususnya kepada orang-orang yang terlibat, dan pengadaan dana yang signifikan, dilakukan secara hati-hati dan melalui Komite Keuangan.

Peringkat rata-rata selama 6 tahun terakhir untuk faktor ini adalah 2 (Baik).

10. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis Bank (BPRB) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris oleh RUPS dan disahkan oleh Pemegang Saham, akan dievaluasi oleh BPRB dengan mempertimbangkan

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Bank.

Peringkat rata-rata selama 6 tahun terakhir untuk faktor ini adalah 2 (Baik).

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan pelaporan internal

Menilai apakah setiap BPR dapat diakses untuk memasok pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan dan non-keuangan, termasuk data yang diterbitkan triwulanan, secara tepat waktu, melalui media berita nasional dan Regulator Jasa Keuangan, sesuai dengan peraturan terkait.

Sistem Informasi Manajemen Bank mampu mentransmisikan data dan informasi secara cepat, andal, lengkap dan teratur serta efisien termasuk yang relevan dengan Sistem Pelaporan Internal Bank.

Peringkat rata-rata selama 6 tahun terakhir untuk faktor ini adalah 2 (Baik).

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Sugiyono (2003) Penelitian deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. Menurut Sugiyono (2003) terdapat pula penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan.

Variabel dalam penelitian ini adalah untuk mengukur kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan pedoman surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 yang meliputi faktor CAMEL. Faktor-faktor yang ditinjau adalah:

Tabel 5
Hasil Perhitungan Tingkat Kesehatan Bank PT.BPR Intan Jabar
Tahun 2015 s.d. 2020

RASIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Trend
CAR	23,49%	20,22%	16,43%	16,50%	15,50%	15,30%	-10,16%
KAP	3,80%	4,00%	4,90%	4,63%	5,72%	7,32%	17,80%
NPL	3,55%	3,63%	4,97%	5,62%	7,75%	5,86%	13,36%
PPAP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ROA	2,36%	2,54%	2,21%	2,47%	2,62%	2,33%	-0,28%
BOPO	87,32%	86,06%	87,99%	87,89%	86,98%	87,26%	-0,02%
MANAJEMEN UMUM	68,00%	67,5	82,5	80,00%	82,50%	82,50%	4,95%
MANAJEMEN RISIKO	67,00%	66,67	86,67	80,00%	86,67%	86,67%	6,65%
CASH RATIO	18,55%	14,31%	10,34%	16,64%	19,43%	11,39%	-11,48%
LDR	88,50%	93,44%	92,06%	89,87%	89,12%	91,32%	0,79%
TOTAL CAMEL	93,4	96,11	96,59	96	97	96,73	0,95%
PREDIKAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	

Pengaruh Penerapan GCG terhadap CAMEL

Untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT.BPR Intan Jabar digunakan Uji statistik Regresi berganda, dimana sebelumnya dilakukan Uji lasik untuk kelayakan data yang diuji.

Pada penelitian ini menggunakan sampel PT. BPR Intan Jabar pada tahun 2015-2020 Adapun distribusi sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi yang teratur atau tidak. Model regresi yang efektif memiliki distribusi data yang khas atau mendekati normal. Salah satu metode terbaik untuk melihat normalitas adalah dengan melihat histogram yang membedakan data yang dapat diamati dari distribusi yang identik dengan

distribusi reguler, untuk memverifikasi apakah distribusi data itu alami atau tidak. Namun, mungkin menipu untuk melihat hanya pada histogram, terutama untuk ukuran sampel yang kecil. Proses yang lebih rinci adalah Diagram Probabilitas Biasa, yang memisahkan distribusi kumulatif data individu dari distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan dibuat oleh garis diagonal lurus dan informasi plot akan dikontraskan dengan garis diagonal. Jika distribusi datanya natural, maka garis diagonal akan sesuai dengan garis yang menggambarkan data sebenarnya. Usual Likelihood Plot yang dihasilkan adalah sebagai berikut, berdasarkan hasil uji SPSS pada Lampiran 2, (Ghozali, 2001):

Gambar 1

Hasil Uji Normalitas

Jika dilihat berdasarkan grafik di atas, maka data dari semua data berdistribusi normal. Hal ini karena semua data menyebar mengikuti garis Normalitas.

Multikolinieritas

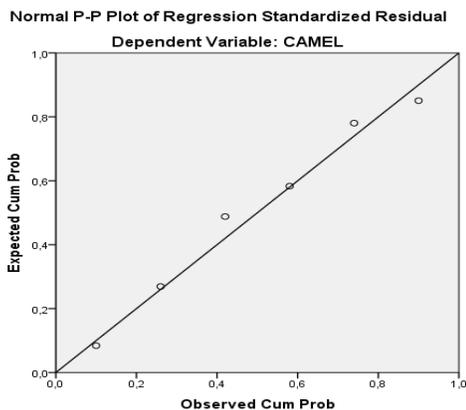
Multikolinieritas juga dapat dilihat dari pentingnya resistensi dan kebalikan dari volatilitas faktor inflasi, menurut Imam Ghozali (2001; 63). (VIF). Salah satu variabel tersebut menunjukkan variabel independen mana yang dideskripsikan oleh variabel independen lainnya. Setiap variabel independen menjadi variabel dependen terhadap variabel independen lainnya secara jelas dan terbalik. Toleransi mengukur volatilitas variabel independen yang dipilih, yang tidak dapat dijelaskan oleh beberapa variabel independen. Nilai toleransi rendah dengan demikian identik dengan nilai VIF tinggi dan collinearitas tinggi disimpulkan (karena $VIF = 1 / \text{toleransi}$). Nilai cutoff yang banyak digunakan adalah nilai toleransi di atas 0,10 atau identik dengan nilai VIF di bawah 10. Derajat kolinearitas yang masih bisa diterima harus dihitung oleh masing-masing studi.

Tabel 6
HASIL MULTIKOLINEARITAS

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Standardized		Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
	Unstandardized Coefficients	Coefficients					
(Constant)	97,715	1,049		93,167	,000		
GCG	-,873	,477	-,676	-1,833	,141	1,000	1,000

a. Dependent Variable: CAMEL

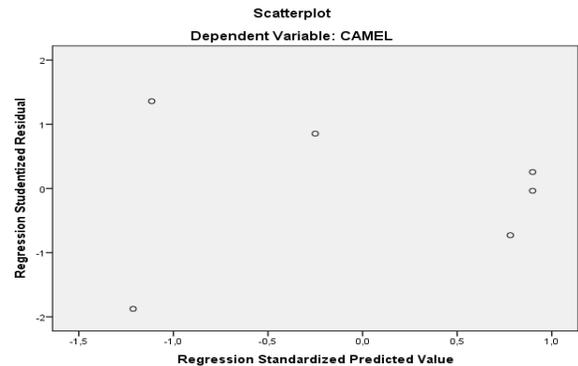
Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian di atas bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan nilai



toleransinya di atas 0,10. untuk hasil pengujian GCG variabel independen. Tepatnya, 0,141. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Asosiasi heteroskedastisitas merupakan kecenderungan varians sehingga tampak tidak valid untuk ukuran signifikan, dengan hasil variabel individual yang sulit dibedakan. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik plot antara nilai ekspektasi variabel dependen dan residualnya untuk mengevaluasi apakah terdapat heteroskedastisitas antar variabel independen. Grafik hasil pengujian heterokedasticity dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2

Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi problem heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi pada model regresi artinya ada korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu saling berkorelasi. Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (Uji DW). Dengan ketentuan

sebagai berikut:

Tabel 7
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,676 ^a	,456	,320	1,08508	2,145	

a. Predictors: (Constant), GCG
b. Dependent Variable: CAMEL

Tidak ada tanda-tanda autocorrelation jika makna Durbin Watson (DW) antara dua dan dua, menurut Imam Ghozali (2011: 111). Diketahui pada Tabel 9 bahwa hasil uji autokorelasi diperoleh nilai DW sebesar 2,145 dengan menggunakan uji Durbin Watson. Oleh karena itu, makna DW dari 2.145 berada di dalam spektrum $DU < DW < 4 \cdot DU$ atau $1.4002 < 2.145 < 2.598$. Ini mendemonstrasikan model regresi bebas masalah untuk autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini regresi linier berganda merupakan analisis statistik yang digunakan. Penelitian ini (GCG) mengukur pengaruh variabel independen yaitu relevansi Good Corporate Governance (GCG) terhadap variabel objektif yaitu CAMEL dengan variabel dependen (CAMEL) yang dapat diukur dengan menggunakan persamaan regresi berganda. Temuan regresi berikut diperoleh berdasarkan simulasi mesin menggunakan program SPSS (Release 24):

Tabel 8
Ringkasan Hasil Estimasi Regresi

Coefficients ^a							
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
						Tolerance	VIF
1 (Constant)	97,715	1,049		93,167	,000		
GCG	-,873	,477	-,676	-1,833	,141	1,000	1,000

a. Dependent Variable: CAMEL

Dari hasil analisis dengan program SPSS tersebut, maka dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk. Adapun persamaan regresi linier yang terbentuk adalah:

$$Y = 97,715 - 0,873X$$

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel bebas GCG berpengaruh terhadap CAMEL. Dari persamaan tersebut dapat terlihat bahwa variabel bebas GCG berpengaruh negatif terhadap CAMEL yang berarti semakin besar Hasil Penilaian GCG BPR tersebut, mengakibatkan CAMEL menurun. Pengujian koefisien regresi bertujuan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) baik secara bersama-sama (dengan Uji F) maupun secara individual (dengan Uji t).

Uji Determinasi

Kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variasi variabel terikat dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinan (R^2), yang berada antara nol dan satu.

Tabel 9
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,676 ^a	,456	,320	1,08508	2,145	

a. Predictors: (Constant), GCG
b. Dependent Variable: CAMEL

Tabel 9 menunjukkan nilai R square sebesar 0,320. Hal ini berarti 32,00 persen CAMEL dipengaruhi oleh variabel bebas Nilai GCG, Sedangkan sisanya 68,00 persen dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di luar model yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Laba (Erning), dan faktor likuiditas.

Uji F (F-test)

Uji F (F-test) dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (GCG) secara

simultan terhadap CAMEL BPR Intan Jabar sebagaimana digambarkan pada tabel 12 sbb:

Tabel 10
Hasil Regresi Uji f

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3,954	1	3,954	3,358	,141 ^b
Residual	4,710	4	1,177		
Total	8,664	5			

a. Dependent Variable: CAMEL
b. Predictors: (Constant), GCG

Regresi linier berganda adalah analisis matematika yang digunakan dalam ulasan ini. Pengaruh variabel independen yaitu pentingnya Good Corporate Governance (GCG) terhadap variabel dependen yaitu CAMEL dihitung dengan analisis ini GCG, mempunyai pengaruh yang berarti terhadap CAMEL.

Uji t (t-test)

Uji t (t-test) ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara parsial (individu) variabel- variabel independen (GCG) terhadap variabel dependen (CAMEL) atau menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen.

Tabel 11
Hasil Regresi Uji t

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	97,715	1,049		93,167	,000		
GCG	-,873	,477	-,676	-,141	1,000	1,000	1,833

a. Dependent Variable: CAMEL

Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 93,167 dengan derajat signifikansi 0,000. Artinya nilai P lebih kecil dari 0,05, artinya H1 termasuk dalam konsekuensi

pengujian dan menolak H0. Dari hasil uji-t ini dapat disimpulkan bahwa variabel GCG memiliki pengaruh parsial terhadap CAMEL. Sedangkan dari hasil persamaan regresi dapat dilihat bahwa koefisien untuk bagian ini adalah negatif, sehingga pengaruh variabel GCG terhadap CAMEL adalah negatif. Keadaan ini mengimplikasikan bahwa semakin tinggi nilai GCG BPR Intan Jabar (semakin memburuk) maka semakin rendah pula nilai CAMELnya. Terbukti bahwa GCG secara bersamaan mempengaruhi CAMEL di BPR Intan Jabar selama 2015-2020, berdasarkan data review. Pengaruh variabel GCG terhadap CAMEL menunjukkan bahwa semakin baik penerapan GCG oleh BPR Intan Jabar, semakin baik output CAMEL maka semakin buruk kualitas CAMEL akan menurun dengan penerapan GCG. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh persamaan regresi bahwa koefisien untuk komponen ini adalah negatif, sehingga mengimplikasikan bahwa pengaruh variabel GCG yang diberikan kepada CAMEL adalah negatif, hal ini mengimplikasikan bahwa karena nilai GCG sistem berada antara 1 dan 5, maka semakin tinggi, semakin besar nilai CAMEL. Semakin kuat pengaruhnya terhadap CAMEL maka semakin rendah nilai GCG antara 1 hingga 5.

KESIMPULAN

Berpusat pada nilai 0,320 dari R square. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen nilai GCG mempengaruhi 32,00% CAMEL, sedangkan 68% lainnya dipengaruhi oleh penyebab lain di luar model penelitian, antara lain Capital Adequacy Ratio (CAR), Earning Asset Rating (KAP), Benefit (Erning), dan elemen likuiditas. Nilai F hitung sebesar 2.071 dengan nilai P sebesar 0,246 diperoleh dari pengaruh pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa nilai P lebih dari 0,05 yang berarti Ho disetujui dan H1 ditolak oleh hasil pengujian. Dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa komponen GCG memiliki pengaruh yang besar terhadap

CAMEL. Dari tabel 19 dapat dilihat bahwa arti t adalah 67.532 dengan derajat kepentingan 0.000. Ini mengasumsikan bahwa nilai P kurang dari 0,05, menyiratkan bahwa efek dari pengujian mencakup H_1 dan menolak H_0 . Dari hasil uji- t ini, dapat disimpulkan bahwa variabel GCG berpengaruh secara parsial terhadap CAMEL.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mas Daniri. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia
- Azhar Maksum: *Tinjauan Atas Good Corporate Governance Di Indonesia*, 2005.
- Bank Indonesia (1997), Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR Tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, 30 April 1997.
- Bank Indonesia, 1998, UU No. 10 tahun 1998, tentang perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992, Jakarta.
- Bank Indonesia. 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta: Gramedia
- Bank Indonesia. 2004. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2017, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017),
- Budisantoso, T dan Triandaru, S. 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat: Jakarta.
- FCGI. 2008. *Corporate Governance Suatu Pengantar: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Jakarta.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor : kep-117/m-mbu/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada badan usaha milik negara (BUMN)
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) *Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*
- Organization for Economic Cooperation and Development. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance 2004*. The OECD Paris.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Yentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- Prowse, S. (1998). *Corporate Governance: Emerging Issues and Lessons from East Asia*. Washington: World Bank.
- SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
- SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Shleifer, Andrei dan Vishny, Robert W. (1997). "A Survey of Corporate Governance." *Journal of Finance*. Vol. 52 No. 2: 737-783.
- Surat Keputusan DIREKSI BI No.26/20/KEP/DIR, Tanggal 29 Mei 1993 dan SE BI No.26/2/BPPP Tanggal 29 Mei 1993,
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah*

- dipahami. Yogyakarta: PT Pustaka Baru
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993
- Surat Edaran Bank Indonesia No.26/9/BPPP tentang Penyempurnaan PPAPWD.29 Mret 1994
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Keputusan Dir BI No.26/167/KEP/DIR/94 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei tahun 1993 tentang Penyertaan Modal.Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank.
- Susilo, Y. Sri., Tiandaru, Sigit., dan Santoso, A. Totok Budi. 2005. "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya". Salemba Empat\
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). Manajemen Keuangan bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance. Balairung. Yogyakarta
- www.bi.go.id
- www.bij.go.id
- www.ojk.go.id